

## TUJUH PENUTUP

### Kesimpulan

Secara umum, temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan:

*Pertama, Menyama braya* bagi masyarakat Bali selain sebagai kearifan lokal yang menjadi landasan moral dalam membangun relasi sosial merupakan kekayaan utama dalam hidup dan sebagai jalan untuk menggapai kedamaian dan keharmonisan yang telah ada sejak lama. Kearifan lokal ini memiliki makna bahwa semua orang (orang lain) merupakan saudara atau keluarga, tidak ada orang lain atau *wong liyan*. Karena merupakan saudara atau keluarga, maka perlakuan terhadap orang lain diperlakukan seperti keluarga sendiri. Orang lain memiliki makna plural atau berbeda. Ketika *menyama braya* memaknai orang lain merupakan saudara atau keluarga, maka *menyama braya* memiliki makna plural, menghargai perbedaan dan menempatkan orang lain sebagai keluarga. Pengejawantahan *menyama braya* ini dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti: kegiatan suka (pernikahan dan pemberian nama) dan duka (kematian), gotong royong, saling memberi, perayaan keagamaan, dan pengelolaan organisasi (*seka* dan *subak*).

Terwujudnya nilai-nilai *menyama braya* pada berbagai bentuk kegiatan dalam relasi sosial masyarakat Bali, juga merupakan aplikasi langsung dari keyakinan masyarakat Bali pada pemahaman *menyama braya* tersebut. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap terintegrasi meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya di tengah dirinya yang plural atau tetap dapat memiliki pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Dengan demikian, *menyama braya* sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Bali akan senantiasa berfungsi: *pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan budaya. *Ketiga*, tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, daya ikat lebih mengena dan bertahan. *Keempat*, memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal-balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. *Keenam*, dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Dalam studi ini, *setting* dinamika masyarakat Desa Pemogan menjadi objek dalam mendalami makna *menyama braya* dalam kaitan dengan pluralitas dan integrasi sosial dan perubahan serta makna dari perubahan tersebut. *Menyama braya* dikenal, dianut dan dilakukan oleh masyarakat Desa Pemogan yang plural agama, etnis dan budaya, seperti: tradisi *megibung*, *ngejot*, *seka*, penggunaan bahasa Bali, untuk komunikasi dan relasi sosial antar masyarakat Bali, dan juga dari nama yang dipakai seperti Putu, Kadek, Komang, dan Ketut, dalam *setting* masyarakat kampung Islam Kapaon. Banyaknya tradisi Bali yang masih terpelihara dalam interaksi sosial masyarakat desa Pemogan, termasuk

pada keseharian masyarakat Banjar adat Kampung Islam Kapaon tak lepas dari sejarah kampung yang berstatus sebagai *banjar* (kelompok masyarakat tradisional Bali) di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan itu.

*Kedua*, seiring dengan perubahan dan dinamika yang merupakan ciri hakiki dari masyarakat dan sekaligus sebagai fenomena yang selalu mewarnai perjalanannya, tidak terkecuali masyarakat Bali, kearifan lokal *menyama braya* pun turut mengalami perubahan dalam pengertian *regress*. Nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang terkandung dalam *menyama braya* (saling asah, saling asih dan saling asuh) kini telah berubah atau makin rapuh. Bahkan ada istilah *nyama* (saudara menunjukkan kedekatan) menjadi *jelema* (menunjukkan kejauhan).

Perubahan tersebut, dalam dinamikanya tidak terlepas dari perubahan karakter masyarakat Bali secara individu maupun kolektif yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adanya perubahan dari budaya agraris yang semula menjadi landasan kehidupan budaya dan masyarakat Bali kini berubah menjadi orientasi kepada jasa dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Faktor eksternal bersumber dari kegiatan industri pariwisata yang telah menyebabkan terjadinya perubahan mata pencaharian (pertanian ke industri pariwisata), gaya hidup (produktif ke gaya hidup konsumtif), pandangan hidup (kolektifisme mengarah ke individualisme), dan perubahan karakter dari yang dulu ramah, santun dan bergaul kini cenderung beringas dan suka berkonflik serta mimicu arus pendatang yang memiliki rasionalitas ekonomi, agar mereka *survive*.

Pelbagai fenomena sosial sebagai faktor penyebab perubahan *menyama braya* juga tampak dalam kajian ini seperti *Ajeg Bali* sebagai sebuah gerakan tentang identitas ke-Bali-an yang diformulasikan lewat agama, adat dan kebudayaan, globalisasi yang dicirikan oleh *ethoscape*, *technoscape*, *mediascape*, *finanscape*, dan *ideoscape*, tradisi *suryak siu* yang melegitimasi tereliminasi hak-hak individu, pendatang/tamui yang dilihat dari sudut asal, agama, lamanya

bertempat tinggal dan tujuan datang di Bali, sosial-politik (Otonomi Daerah dan Undang-Undang Desa Pakraman) yang implementasi yang mengarah pada pengentalan identitas antara apa yang disebut Bali dan non Bali, dan militansi keagamaan, agama sebagai salah satu faktor determinan terkait dengan persoalan integrasi, karena selain sebagai kekuatan pengikat sekaligus menyimpan potensi konflik .

Aktualisasi dari faktor penyebab tersebut, dicirikan dengan bersikap resisten terhadap pendatang Jawa dan non Hindu karena dicurigai sebagai ancaman, pembawa *leteh* (cemar) bagi Bali yang suci, dan sebagai perusak tatanan Bali yang harmoni dan *ajeg*, yang ditunjukkan melalui tindakan-tindakan, misalnya melalui kolaborasi antara pemerintah dan Adat dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang penduduk pendatang: menyangkut proses seleksi, pemeriksaan administrasi kependudukan dan memulangkan, *sweeping* penduduk yang secara berkala dan sinergis alasan "*nindhin Bali*" (menjaga dan siap berkorban) demi ketertiban Bali, lahirnya KIPP (Kartu Identitas Penduduk Pendatang) dan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) dan anjuran untuk tidak membeli bakso, pecel lele, getuk lindrin dan sejenisnya kepada pedagang-pedagang dari Jawa.

Beberapa faktor lain yang ditemukan juga dalam fenomena Desa Pemogan yang telah menyebabkan perubahan *menyama braya* adalah masyarakat yang makin individualistis karena kemajuan ekonomi dan makin heterogennya masyarakat dalam hal agama, etnis dan budaya.

*Ketiga*, perubahan ini, menunjukkan bahwa memang ada orang lain dan harus didata secara formal. Menjadi bukti bahwa tidak semua orang adalah *nyama* (saudara) atau keluarga. *Nyama* telah dipahami secara sempit dan terbatas, mereka adalah orang yang se-klen, se-agama, se-etnis, sesama Bali, bahkan dalam situasi tertentu *nyama* bukan lagi se-etnis dan se-agama, hal ini dapat dilihat intensnya konflik-konflik adat yang terjadi. Dengan perkataan lain, *nyama* bukan lagi menjadi kekayaan yang utama dalam hidup, jalan untuk menggapai *dharmasanthi* (kebahagiaan dan keharmonisan) dan bukan

lagi menjadi landasan moral yang efektif untuk membangun dan membina relasi sosial.

Pergeseren dan makna perubahan tersebut, telah berdampak pada masyarakat Bali dalam menyikapi pluralitas, multikulturalisme, dan dalam relasi dan integrasi sosialnya serta sekaligus memberi peluang kemungkinan terkonstruksinya praktik-praktik yang mengarah pada tindakan destruktif dan diskriminatif. Makna perubahan juag telah berdampak pada bentuk perendahan martabat kemanusiaan, sub-ordinat dalam relasinya dan sekaligus melahirkan kehidupan sosial yang partikularistik, primordial, triumphalistik, anti pluralistik, anti multikultural, memicu timbulnya diferensiasi sosial, cenderung kontravensi dan bermanifes menjadi potensi konflik.

Terhadapnya, perlu ada solusi alternatif sebagai konsepsi dan implementasi dari kerinduan untuk mengembalikan dan merevitalisasi makna *menyama braya* dalam relasi sosial masyarakat Bali yang mutikultural, yakni dengan **‘Membangun persaudaraan dalam perbedaan’** dan **‘Membangun persaudaraan di dalam Tuhan’**.

Penting ada upaya untuk mengembalikan *“Bali”* dalam makna awal *menyama braya*, namun bukan berarti mengeliminasi dinamika atau perubahan yang ada, sebab itu *menyama braya* haruslah hidup dalam konteks kekinian. Perubahan *nyama* menjadi *jelema* tidak perlu terus terjadi. *Menyama braya* bukanlah menghilangkan yang beda atau konsep hidup yang dianalogikan sebagai *melting pot* di mana unsur-unsurnya saling mencair/melebur yang akhirnya menuju satu kesatuan. Tidak juga seperti *juice*, yang dalam pembuatannya diolah sedemikian rupa melalui proses tertentu di mana hasil akhirnya adalah sebuah minuman satu rasa. Ia lebih tepat dianalogikan sebagai *gado-gado*, yang bahan-bahannya beragam namun saling menunjang perpaduan yang harmonis keseluruhan rasa. Ia mengakui yang berbeda. *Menyama braya* harus dikembalikan dengan pemaknaan bahwa semua manusia bersaudara atau tidak ada *wong liyan* (orang lain). Dan inilah yang seharusnya menjadi proyek masa depan

multikulturalisme di Indonesia, sebagai negeri yang berentitas plural serba neka.

### **Implikasi Teori**

Bertolak dari hasil temuan dan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada pun implikasi teori adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pandangan multikulturalisme dalam *menyama braya* pada masyarakat Bali dalam penelitian ini memperkuat bahkan memperkaya teori multikulturalisme, sebab merupakan aplikasi nyata dari tiga syarat multikulturalisme yang dikemukakan oleh Brian Fay (1998: 7), yakni: interaksi (*interaction*) antar kelompok, keterbukaan (*openness*), dan pembelajaran (*learning*). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dari sebuah masyarakat multikultur. Ideologi multikultur sebagai sebuah bentuk aspek yang bersifat mutual etnik yang memberi keleluasaan agar etnik yang lain dapat mengekspresikan budayanya. Multikulturalisme dipahami sebagai suatu cara pandang tentang kehidupan manusia, bukan sebagai doktrin politik maupun suatu aliran filsafat dengan ketaatan teori tentang ruang hidup manusia dunia. Demikian juga yang dikatakan Parekh (2008: 322) tentang kesetaraan dalam perbedaan. Dan melaluinya masyarakat Bali yang plural terdorong untuk saling berbagi rasa, hak, tugas dan kewajiban dalam membangun kesejahteraan bersama.

Bagi masyarakat Bali yang multikultural, multikulturalisme bukanlah sebuah fenomena baru (abad XX) atau sebagai reaksi terhadap kecenderungan homogenitas budaya akibat globalisasi dan gaya hidup moderen, sebagaimana dikatakan Sudiarja (dalam Basis No.07-08, Tahun ke-58, 2009: 10). Sejak dini masyarakat Bali telah dididik untuk percaya dan mengakui perbedaan serta diarahkan untuk mau saling mendengar dan memahami satu dengan yang lain, sehingga meskipun berbeda etnis, budaya, dan agama dapat hidup bersama secara damai dalam prinsip *co-existence*. Masyarakat Bali telah

menunjukkan pengalaman dan sumbangan dalam mengembangkan semangat multikulturalisme dalam rentang waktu yang panjang.

Semangat multikultural yang kental dalam masyarakat Bali yang didasari pada sastra lisan keseharian masyarakat dalam mengakui akan adanya perbedaan, kemajemukan dan multikulturalisme: “*Celebingkah beten biu, belahan pane belahan peso; gumi linggah aja liu, ade kene ade keto*” (Bumi ini besar dengan jumlah manusia yang banyak, dan manusia yang banyak memiliki kemajemukan) pada sisi lain, juga dilandasi oleh potensi-potensi dasar yang membangun budayanya, sebagaimana dikatakan Mantra, seperti: konsep *Rwa-Bhineda* (dualistis), *Desa, Kala, Patra* (ruang, waktu, dan konteks), *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan), *Tatwamasi* (aku adalah engkau, engkau adalah aku), dan *Karmapala* (hasil dari suatu perbuatan). Dalam konteks ini, multikulturalisme di Bali, tidak hanya dimaknai memperkaya khazanah budaya tetapi juga spiritual. Misalnya, hari raya yang disebut *sugihan Jawa*, di mana dalam hari raya ini sarana upacara biasanya ada “*banten selam*” (sesajen Islam), yaitu yang dibuat dari ayam atau itik, bukan dari daging babi. Upacara *ngusaba dangsil* (upacara selamatan desa atau *subak*) di Bungaya kangin, Bebandem, Karangasem, di mana dalam rangkaian upacara ini akan dapat berjalan baik, sehingga ketentraman dan kebahagiaan yang diharapkan dapat terwujud bila ada keterlibatan langsung dari *nyama Islam* Belalungan (salah satu komunitas Islam yang ada di Karangasem). Makam Raden Ayu Siti Khotijah yang menjadi simbol kerukunan umat khususnya antara umat Islam dan Hindu di Bali, di mana umat bertemu dalam satu tempat dalam kegiatan spritualnya. Demikian juga, pada karya sastra yang mengandung kebudayaan Islam-Hindu, seperti: *krama selam* (witaning selam), *tatwa berawa*, *Seh Umbul Ibrahim* (Kitab Tasaup Cara Bali), *sejarah Jawa lan Sejarah Arab*, *Jajaluk Selam ing Mekah*, *Ana Kidung*, *Geguritan Ahmad Muhamad Raden Saputra*, *Geguritan Siti Badariah*, *seni gambuh*, *kesenian cakepung (cerita Panji Ahmad-Muhamad, Ratu Magedap dari Mesir, Rebana, Wayang Sasak*, dan *Geguritan Tamtam* (Suardeyasa, dalam Media Hindu Oktober

2010: 33), merupakan refleksi dari realitas masyarakat Bali yang multikultural. Ia dianalogikan sebagai *gado-gado*, yang bahan-bahannya beragam namun saling menunjang perpaduan yang harmonis keseluruhan rasa.

*Kedua*, pandangan pluralitas agama dalam konteks *menyama braya* di Bali dalam penelitian ini adalah bentuk aktualisasi dan mengukuhkan teori pluralitas agama bahwa untuk hidup dalam keanekaragaman agama secara harmoni, terintegrasi, dan dalam hubungan yang tidak sub-ordinat, seharusnya agama-agama menyadari dan menyadarkan warganya bahwa pluralitas agama bukanlah dosa dan sesuatu yang harus dinisbikkan, melainkan suatu potensi yang besar dalam mengembangkan kehidupan beragama yang satu dengan yang lain dalam penyembahan kepada Tuhan yang absolut. Tidak ada satu agama yang absolut. Walaupun agama itu memang merupakan pernyataan yang Absolut, tetapi itu tidak menjadikan agama sebagai absolut (Paul Knitter (1985: 288), melainkan hanya Tuhan yang absolut, benar dan final atau apa yang oleh John Hick disebut Kekal (*eternal one*) dan Hans Kung adalah *absolute* (dalam Titaley 2001: 28), bagi manusia dan masyarakat. Dalam pemahaman yang demikian, maka pluralitas agama tidak boleh dilihat sebagai sistem yang tertutup dari ide-ide dan doktrin-doktrin, melainkan pluralitas adalah suatu kerangka interaksi, tempat setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik serta dalam kesetaraan agama-agama, akan membuka pintu bagi setiap orang merasa perlu saling berbagi pengalaman hidup berimannya dalam rangka saling mencari pada agama lain inspirasi yang saling memperkaya identitas dan praksis iman dalam kebersamaan hidup.

Aplikasi pandangan di atas, juga bertolak dari sastra lisan atau ungkapan sederhana dalam keseharian sosial masyarakat Bali: "*Akuda ada gumi: besik, akuda ada manusa: liu, akuda ada gama: liu, dan akuda ada Widhi: besik*" (Berapa ada bumi: satu, berapa ada manusia: banyak, berapa ada agama: banyak, dan berapa ada Tuhan: satu). Ungkapan ini



memiliki pengertian dan makna bahwa Tuhan yang satu menciptakan manusia dan agama yang banyak, dengan maksud agar manusia dan agama yang banyak saling melengkapi dan berjuang bersama di bumi yang satu dalam membangun keharmonisan dan kedamaian serta keadilan. Pada sisi lain, ungkapan ini juga bermakna bahwa pluralitas tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun juga terlibat aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut.

*Ketiga*, perubahan sosial masyarakat Bali, dalam konteks perubahan *nyama* menjadi *jelema* yang terjadi karena berbagai fenomena sosial seperti: *Ajeg Bali*, globalisasi, pariwisata, tradisi *suryak siu*, pendatang, otonomi daerah dan militansi keagamaan, mempertegas teori perubahan sosial. Sebagaimana pemahaman Soekanto (2003: 310) perubahan sosial akan dapat terjadi dalam masyarakat karena adanya sesuatu yang tidak lagi memuaskan dalam masyarakat. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada satu sisi, perubahan dalam kehidupan masyarakat manusia tidak mungkin terhenti pada satu titik tertentu, ia berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu, apakah direncanakan atau tidak maupun yang bersumber dari masyarakat itu sendiri atau luar masyarakat itu sendiri. Pada sisi lain, perubahan sosial juga tidak dapat disangkal, mengandung faktor resiko, karena dalam batas-batas tertentu perubahan sosial dan kebudayaan tidak saja menggoyahkan budaya yang berlaku dan merusak nilai-nilai dan kebiasaan yang dihormati, akan tetapi juga mengandung faktor-faktor resiko tertentu antara lain: adanya kepentingan individu dan kelompok, timbul masalah sosial atau dampak yang tidak dikehendaki, kesenjangan budaya (*cultural lag*). Demikian juga pandangan (Matsumoto 2000: 9-11) perubahan terjadi karena manusia adalah makhluk sosial, di mana dalam kehidupan kesehariannya selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut bisa dalam bentuk bahasa, budaya maupun agama, yang secara potensial dapat memunculkan permasalahan ketika manusia mencoba menafsirkan alasan yang mendasari atau menyebabkan adanya berbagai perbedaan. Karena kita semua berada

di dalam kebudayaan masing-masing, dengan latar belakang kultural kita sendiri, kita cenderung melihat sesuatu dari kaca mata latar belakang tersebut. Sehingga penafsiran kita tentang perilaku orang lain bisa melenceng sangat jauh. Dengan perkataan lain, kadang kita tidak bisa memisahkan diri kita dari latar belakang dan bias-bias kultural sendiri dalam memahami perilaku orang lain.

Dengan demikian, terjadinya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Bali adalah fakta yang tak terbantahkan. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan merupakan fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan sekaligus ciri yang hakiki dalam masyarakat. Setiap masyarakat selalu mengalami transformasi dalam fungsi dan waktu, sehingga tidak ada satu masyarakat pun yang mempunyai potret yang sama, kalau dicermati pada waktu yang berbeda. Meskipun laju perubahan yang bervariasi dan juga harus diakui perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan, namun dapat pula berarti kemunduran.

### **Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan dan implikasi teori di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

*Pertama*, bagi masyarakat Bali. Bali, sebagaimana masyarakat bangsa pada umumnya, kaya akan kearifan lokal, salah satunya adalah *menyama braya*. Sejarah menjadi bukti bahwa *menyama braya* selain menjadi sumber nilai untuk menjaga integrasi dan harmoni sosial dalam relasi sosialnya, ia juga adalah kekayaan utama dalam hidup dan jalan untuk menggapai *dharmasanti*. Untuk, menjaga nilai-nilai luhur tersebut, agar tidak terus tergerus oleh perubahan atau makin rapuh yang berujung pada disintegrasi dan disharmoni sosial, setiap masyarakat Bali perlu memperkokoh budaya hidup *menyama braya*.

*Kedua*, bagi GKPB sebagai salah satu komponen kemajemukandi Bali dan belajar dari pengalaman historis serta bertolak dari visinya 2008-2028 “Bumi Bersukacita Dalam Damai Sejahtera”. Untuk itu, sudah waktunya GKPB juga menggumulinya dalam wacana teologi yang berpijak pada kearifan lokal Bali, yang memiliki nilai-nilai pengakuan adanya perbedaan, kemajemukan dan multiklulturalisme, sehingga kehadirannya tidak hanya bermakna bagi warganya sendiri tetapi juga bagi masyarakat lain (Bali khususnya dan umumnya Indonesia). Dengan demikian diharapkan akan terbangun sebuah relasi sosial dalam kehidupan bersama yang harmoni dan penuh rasa persaudaraan dalam kesederajatan serta persaudaraan di dalam Tuhan.

*Ketiga*, bagi para tokoh agama dan masyarakat Bali, untuk mampu memerankan diri sebagai figur penyejuk lewat perilaku keteladanannya, bukan sebaliknya justru tampil sebagai agen yang mendorong tumbuh suburnya budaya anarkis. Para tokoh juga seharusnya dapat menjadi pelopor dalam menyikapi perbedaan dengan memberikan pemahaman yang baik dan melihat mengenai pentingnya paradigma nilai kemanusiaan di balik maraknya ritual-ritual keagamaan. Dengan demikian integrasi masyarakat akan tetap terpelihara dan pada akhirnya konflik horizontal pun terhindarkan.

*Keempat*, bagi pemerintah provinsi Bali, hendak setiap kebijakan yang diambil akan tetap dapat berpihak pada semua masyarakat apa pun golongan, agama dan etnisnya bukan kebijakan-kebijakan sumir yang mendekorasi berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakan. Misalnya, dalam penanganan pendatang, sarana dan prasarana tempat ibadah dan ekonomi. Atasnya kearifan lokal *menyama braya* perlu dikedepankan. Pada sisi lain, pemerintah juga perlu memiliki kemauan politik (*good will*) dalam menggali dan mengembangkan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal yang mengakui adanya perbedaan atau pluralitas. Misalnya, melalui pendidikan formal maupun non formal dengan satu harapan pemahaman generasi muda dan masyarakat secara umum terhadap kearifan lokal akan meningkat sehingga pada gilirannya menimbulkan pemahaman terhadap jati diri.

Penerapan kurikulum muatan lokal kiranya menjadi peluang untuk menjadikan kearifan lokal sebagai mata ajar. Dengan demikian kearifan lokal akan mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan sekaligus sebagai benteng dalam menjaga integrasi dan harmoni sosial di tengah dinamika masyarakat yang multikultural.



